

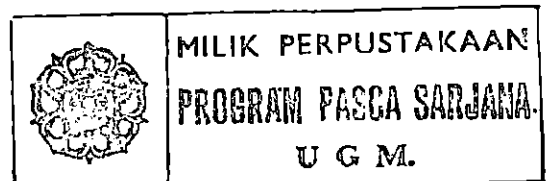


INTISARI

Transportasi perdesaan merupakan salah satu komponen penting dalam memberikan kontribusi terhadap usaha pengentasan kemiskinan masyarakat perdesaan. Selain itu transportasi perdesaan juga merupakan salah satu pilar ketahanan ekonomi daerah kabupaten. Sistem jaringan jalan perdesaan belum secara tegas diatur dalam suatu undang-undang atau peraturan pemerintah. Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang jalan, mengatur sistem jaringan jalan di Indonesia secara umum. Pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang jalan, menyebutkan bahwa jaringan jalan di daerah perdesaan adalah merupakan sistem jaringan jalan sekunder yang berada di daerah perdesaan termasuk di dalamnya jalan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah : Mengetahui kinerja jaringan jalan desa yang didasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kimpraswil, persepsi masyarakat terhadap tingkat pelayanan jaringan jalan yang sudah ada saat ini serta keinginan masyarakat terhadap pengelolaan jaringan jalan desa.

Penelitian ini dilakukan pada enam desa di wilayah Kabupaten Sleman. Data yang diperoleh berupa data primer yang berwujud hasil data kuesioner, wawancara, pengukuran geometri jalan dan pengamatan langsung dilapangan serta data sekunder yang berwujud peta desa, profil desa dan data tingkat perkembangan desa. Analisis dilakukan dengan menghitung indeks aksesibilitas jalan dibandingkan terhadap SPM serta kajian indikator kinerja jaringan jalan berdasarkan persepsi dan keinginan responden. Analisis juga dilakukan terhadap manajemen sumber dan alokasi dana pengelolaan jaringan jalan desa di lokasi studi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh indeks aksesibilitas Desa Catur Tunggal, Desa Sinduadi, Desa Condong Catur, Desa Donokerto, Desa Purwobinangun dan Desa Tridadi, di olah berdasarkan SPM masing-masing sebesar 67,4 m/ha, 181,8 m/ha, 76,8 m/ha, 91,8 m/ha, 47,6 m/ha, 38,7 m/ha, dan dari hasil evaluasi ternyata sudah sama berdasarkan keinginan masyarakat, prioritas utama tujuan dan hasil penanganan jaringan jalan desa adalah perbaikan konstruksi perkerasan dan perbaikan aksesibilitas jaringan jalan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa prosentase dana pengelolaan jalan terhadap total dana pembangunan di Desa Catur Tunggal, Desa Sinduadi, Desa Condong Catur, Desa Donokerto, Desa Purwobinangun dan Desa Tridadi untuk pembangunan jalan berkisar antara 7% - 28%, sedangkan pemeliharaan berkisar antara 10% - 24%, dan peningkatan jalan berkisar antara 10% - 17%.





ABSTRACT

Rural transportation is an important component in contributing to rural poverty handling. Beside that, it also is a pillar of regional economy tenacity. The rural road network system hasn't explicitly arranged in a distinct act (UU or PP). UU no. 13 year 1980 about road, only arrange the road network system in Indonesia generally. In PP no. 28 year 1985 about road, declare that the road network in rural area is a secondary road network system that exists in rural area, including environmental road. The purpose of the research is: To explore the performance of the rural network road based on the SPM Kimpraswil, society perception on the level of existing road network service, and what the society demand for rural road network management.

The research has done on six villages in Sleman regency. Datas that have been acquired are primary datas (questioner, interview, road geometry measurement, and direct exploration) and secondary datas (village maps, profiles, and level of development). Analysis is done by calculating road accessibility index compared to SPM and the examination of road network performance indicators based on respondents' perceptions and wishes. Analysis is also done on source and allocation management of the fund for rural road network maintenance in research locations.

Based on research results, village accessibility indexes of Catur Tunggal, Sinduadi, Condong Catur, Donokerto, Purwobinangun, and Tridadi can be gained. Calculations are based on each SPMs: 67,4 m/ha, 181,8 m/ha, 76,8 m/ha, 91,8 m/ha, 47,6 m/ha, 38,7 m/ha. From the evaluation result, same as what society demanded, it can be concluded that the main priority of rural road network development is to make better hardener construction and road network accessibility. The research result also shows that the percentages of the road maintenance fund from the total development fund in Catur Tunggal, Sinduadi, Condong Catur, Donokerto, Purwobinangun, and Tridadi villages for road building are between 7% - 28%, for maintenance are between 10 - 24%, and for road raising are between 10% - 17 %